

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017 DALAM
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
DESA HESSA PERLOMPONGAN KECAMATAN
AIR BATU KABUPATEN ASAHAN**

SKRIPSI

OLEH:

**DIAN NUR UTAMA SARAGIH
14 852 0058**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017 DALAM
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
DESA HESSA PERLOMPONGAN KECAMATAN
AIR BATU KABUPATEN ASAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh:

**DIAN NUR UTAMA SARAGIH
14 852 0058**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Dalam
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Hessa
Perlomongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan

Nama : Dian Nur Utama Saragih

NPM : 14 852 0058

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh,
Komisi Pembimbing


Dr. Abdul Kadir, M. Si
Pembimbing I


Walid Musthafa S. Sos, M. IP
Pembimbing II


Dra. Rosmala Dewi, M. Pd
Ketua Program Studi
Administrasi Publik


Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Dekan Fakultas ISIPOL
Universitas Medan Area

Tanggal Lulus: 30 Mei 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang disusun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, April 2018



Dian Nur Utama Saragih
NPM: 14 852 0058

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Nur Utama Saragih

NPM : 14 852 0058

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, April 2018

Yang menyatakan

Dian Nur Utama Saragih
NPM: 14 852 0058

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017 DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA HESSA PERLOMPONGAN KECAMATAN AIR BATU KABUPATEN ASAHAN

Kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang penting untuk diperhatikan peningkatannya karena merupakan cita-cita dari penyelenggaraan negara, hal ini tentu menjadi tanggung jawab besar khususnya bagi Pemerintah Desa karena memiliki wewenang yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya ialah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya kepada tiap Desa yang ada dimasing-masing Kabupaten, salah satu yang memperolehnya ialah Desa Hessa Perlompongan yang berada di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yaitu pada tahun 2017. Pengelolaan ADD untuk tahun 2017 di Desa Hessa Perlompongan telah diatur dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan menjadikan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan dari pengelolaannya. Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk melakukan penilitan dengan judul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk mengukur keefektifan dari pengelolaan ADD tersebut penulis mencoba menyesuaikan penelitian ini dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Duncan yaitu: Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Dalam penelitian ini dapat digambarkan bahwa pengelolaan ADD tahun 2017 di Desa Hessa Perlompongan masih belum berhasil menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dikarenakan masih adanya kendala yang menghalangi pencapaian tujuan tersebut, misalnya seperti jumlah dana yang disalurkan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa sangat terbatas dan banyak kebutuhan internal Pemerintah Desa yang dipenuhi dengan menggunakan ADD sehingga tidak dana yang disalurkan belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuklah masyarakat yang berprofesi sebagaimana tercover dalam ADD seperti guru mengaji, bilal mayit, penggali kubur dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kesejahteraan.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT OF THE ALLOCATION OF FUNDS OF THE YEAR 2017 FOR ENHANCING THE WELFARE OF SOCIETY IN THE VILLAGE HESSA PERLOMPONGAN THE DISTRICT AIR BATU OF THE ASAHAN.

Welfare society to be important to note the increase because it is the aspiration of the implementation of the country, this would be a great responsibility, especially for the Government of the Village because it has the authority of the area in the implementation of the government in Indonesian. One of the efforts made by the Government in improving the welfare of society is to provide Allocation of Village Funds every year to each of the respectively the one who is the Hessa Perlompongan in the Air Batu of the Asahan regency of North Sumatera, which is in 2017. The management Allocation of Village Funds for the year 2017 at the Hessa Perlompongan have been set up in a regulation of the Asahan No. 8 Year 2017 Guidelines for Management Allocation Fund of the year 2017 and make improving the welfare of society as one of the goals of its management. Based on this is a writer interested in doing research with the title of the Effectiveness Allocation Fund of the year 2017 In The Improvement of Public Welfare Society in the village of Hessa Perlompongan the Air Batu of the Asahan Regency with using the method of research a qualitative. To measure effectiveness of the management Allocation of Village Funds is a writer trying to fit this research by using the theory put forward by Duncan, namely: Achieving the goal, integration and adaptation. In this study can be described that the management Allocation of Village Funds in 2017 at the Hessa Perlompongan is still not succeeded in creating the improvement of public welfare because there are still problems that impede the achievement of these objectives, such as the amount of funds disbursed from the Government of the to the very limited and a lot of the needs of internal Government of which are filled with the use of Allocation of Village Funds so that no funds are distributed not enough to improve the welfare of society, including the community who works as covered in the Allocation of Village Funds as tutor, the dead bilal, the gravediggers and so forth.

Keywords: Effectiveness, Management Of The Allocation Of Funds, Welfare.

RIWAYAT HIDUP

Dian Nur Utama Saragih lahir di Simpang Kawat, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan pada tanggal 27 Mei 1996. Anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan ayahanda Junedi Saragih dan ibunda Nurtini.

Pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah TK Syahadah Simpang Empat, SD Negeri 010050 Simpang Kawat, SMP Negeri 3 Simpang Empat, SMA Negeri 1 Simpang Empat. Pada tahun 2014 melanjutkan studi di Universitas Medan Area, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Administrasi Publik.

Selama masa perkuliahan, penulis cukup aktif dalam organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus. Di intra kampus pernah mengikuti pendidikan dasar menjadi anggota MAPALA UMA pada tahun 2014, pernah menjadi pengurus Bidang Diskusi dan Penalaran PEMA FISIP UMA Periode 2016-2017 dan di amanahkan sebagai Gubernur PEMA FISIP UMA Periode 2017-2018. Di ekstra kampus pernah mengikuti Latihan Kader 1 HMI Cabang Padang Sidempuan pada tahun 2015, pernah menjadi pengurus HMI Komisariat UMA Periode 2016-2017 dan Periode 2017-2018.

Penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Bagian Informasi dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara selama bulan Agustus tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT Tuhan Sekalian Alam yang selalu memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya dengan penuh kasih sayang. Sholawat besertakan salam semoga tetap selalu mengalir kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun hidup dan sosok manusia yang sangat mulia bagi penulis. Alhamdulillah penulis sampaikan karena telah selesainya penyusunan skripsi dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan” sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta do'a yang ikhlas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua dan Adik tersayang serta seluruh keluarga yang sudah menjadi penyemangat bagi penulis untuk tetap tegar dalam memperjuangkan hidup
2. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

3. Ibu Beby Mashito S. Sos, MAP selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
4. Bapak Armansyah Matondang S. Sos, M. Si Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
5. Ibunda Dra. Rosmala Dewi, M. Pd selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik
6. Bapak Dr. Abdul Kadir, M. Si selaku dosen sekaligus Pembimbing I penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Walid Musthafa S. Sos, M. IP selaku dosen sekaligus Pembimbing II penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Franki Suwito Lubis selaku Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa serta Masyarakat Desa Hessa Perlompongan yang sangat membantu untuk melengkapi data pada saat penelitian
9. Teman satu atap abangda Ikhwan Kurnia Hutasuhut S. AP yang sudah banyak berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga Besar HIMAP FISIP UMA sebagai cikal bakal bagi penulis untuk ingin berproses dalam lingkungan organisasi
11. Keluarga Besar PEMA FISIP UMA sebagai wadah bagi penulis untuk selalu berproses selama menjalani perkuliahan dikampus
12. Keluarga Besar MAPALA UMA sebagai wadah yang memperkenalkan kepada penulis akan luar biasanya kehidupan di alam raya
13. Keluarga Besar HmI Komisariat UMA sebagai wadah yang mempertemukan penulis dengan orang-orang yang memiliki wawasan luas dan pemikiran kritis

14. Seluruh kawan-kawan angkatan 2014 yang tetap Sakti, Aan Rizqi Putra, Sahara Angriani Siregar, Noviana Niswatusoliha, Inda Wardah Hasibuan, Dwi Putri R, Khoirun Nisa Siregar, Irin Hanafia Siregar, M. Arief Rusydi, Andre Efroza, Doni Kanang Tarigan, M. Sukri, Nizar Nazlia, Rizka Fatimah, Ririn Syafitri, M. Vindy Damanik, Rizky Fitrah Denok, Riduan Harefa, Eliyan Maduwu, Mahdalena Manalu, Nur Azmi Ismi Rusdi, Nova Ratna, Nurhalimah, Wendy Andika Praja, M. Taufik, Andika Setiawan dan masih banyak lagi yang lainnya belum bisa disebutkan dalam kata pengantar ini
15. Seluruh adik-adik Pengurus PEMA FISIP UMA Periode 2017-2018 yang masih setia bersama menjalankan kepengurusan, Ferisman Gulo, Dewi Purnama Sari, Ika Suhaila, Imam Gunawan, Ajeng Sabirin, M. Tri Hutomo, Aditia Ningsih, Dinda Emilia, Sinta Kismi Hana, Mina Hia, Alike Mutia Zahra, Anggi Dahliana Lubis dan Anggi Funga Nauli.
16. Seluruh tokoh serta para pejuang yang selalu menegakkan nilai kebenaran dan keadilan sehingga menjadi inspirasi bagi penulis.

Sebagai manusia biasa sudah sepantasnya penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini agar dapat dimaklumi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembacanya dan bisa menjadi bahan referensi dalam berbagai keperluan akademik.

Alhamdulillah 'ala kulli hall

Medan, April 2018
Penulis,

Dian Nur Utama Saragih
NPM: 14 852 0058

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Teori Efektivitas	7
2.1.1. Ukuran Efektivitas	8
2.2. Teori Birokrasi	10
2.2.1. Tipe Dan Prinsip Birokrasi	12
2.3. Alokasi Dana Desa (ADD)	14
2.3.1. Tujuan Dan Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa	14

2.4. Teori Kesejahteraan Masyarakat	16
2.4.1. Bidang-Bidang Dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ..	16
2.4.2. Indikator Kesejahteraan	21
2.5. Penelitian Yang Relevan	24
2.6. Kerangka Pemikiran	24

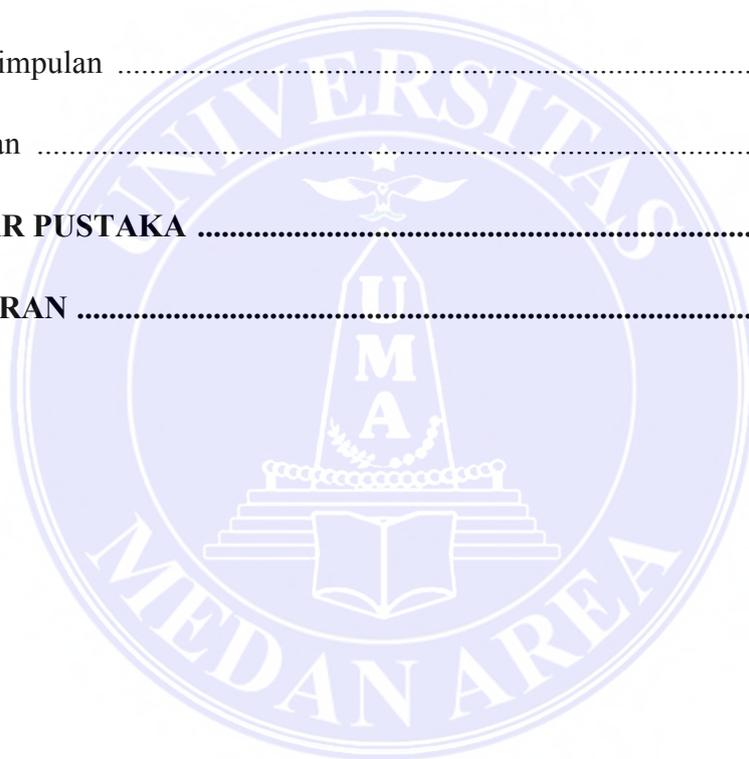
BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	26
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.3. Informan Penelitian	26
3.3.1. Informan Kunci	26
3.3.2. Informan Utama	27
3.3.3. Informan Tambahan	27
3.4. Teknik Pengumpulan Data	27
3.4.1. Observasi	27
3.4.2. Wawancara Mendalam	27
3.4.3. Dokumentasi	28
3.5. Teknik Analisis Data	28
3.6. Uji Keabsahan Data	29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Desa	30
4.2. Penyajian Data	47

4.2.1. Penyajian Data Tentang Efektivitas Pengelolaan ADD Tahun 2017 Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hessa Perlompongan Berdasarkan Wawancara Kepada Informan	47
4.3. Analisa Data	57
4.3.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belum Efektifnya Pengelolaan ADD Tahun 2017 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Hessa Perlompongan	57
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65



DAFTAR TABEL

TABEL 1. Luas Lahan Menurut Peruntukkan	33
TABEL 2. Jumlah Penduduk Menurut Agama Dan Jenis Kelamin	35
TABEL 3. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Dusun Dan Jenis Kelamin	36
TABEL 4. Prasarana Perhubungan	39



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. Kerangka Pemikiran	25
GAMBAR 2. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Hessa Perlompongan	45



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Daftar Realisasi Penggunaan ADD Tahun 2017	65
LAMPIRAN 2. Dokumentasi Penelitian	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan menjadi hal yang sangat diprioritaskan di Indonesia, hal ini terbukti karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah untuk mewujudkan cita-cita mulia dari undang-undang tersebut.

Dalam proses menuju pencapaian tersebut, kesejahteraan rakyat haruslah dimulai dari lapisan yang paling bawah, dalam hal ini pemerintah di tingkat desa tentunya memiliki wewenang yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah desa merupakan unsur dari pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (UU Desa): Dalam UU ini menegaskan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu kepada pernyataan diatas, desa tentunya menjadi prioritas dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga yang membidangi terkait pembangunan desa,

kawasan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat desa atau disebut dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Membahas mengenai kesejahteraan masyarakat desa, tentunya juga tidak terlepas dari pengelolaan dana yang ada di suatu Desa, dalam hal ini ialah pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut, kini Desa memiliki kepastian dalam hal pendanaan yang bisa dikelola langsung oleh Pemerintah Desa, dengan demikian Pemerintah Desa memiliki kesempatan yang lebih besar dalam membangun Desanya masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam rangka pengelolaan terkait Alokasi Dana Desa, perlu adanya komitmen bersama dari para aparat Pemerintah Daerah umumnya dan Pemerintah Desa khususnya, agar Pemerintah Desa dapat menggunakan keuangan Desa secara akuntabel, maka perlu dipersiapkan pengelolaan yang transparan dalam proses penyelenggaraannya mengingat bahwa dana yang dikelola tersebut memiliki jumlah yang cukup besar. Sebagaimana data yang diperoleh dalam situs *desa-membangun.blogspot.co.id* menyatakan bahwa Jumlah Alokasi Dana Desa tahun 2017 yang telah ditetapkan Pemerintah dalam RAPBN tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 60 Triliyun. Besaran dana ini mengalami kenaikan dari Alokasi Dana Desa tahun 2016 yang sebesar Rp.49,96 triliyun.

Dengan besarnya anggaran Alokasi Dana Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang ada di masing-masing daerah sebagaimana yang dimuat dalam situs *desa-*

membangun.blogspot.co.id termasuklah didalamnya Provinsi Sumatera Utara yang memiliki jumlah Desa sebanyak 5.418 Desa, khusus untuk Kabupaten Asahan dengan jumlah Desa sebanyak 117 Desa dan salah satu diantaranya ialah Desa Hessa Perlompongan.

Desa Hessa Perlompongan merupakan wilayah yang terdiri dari empat Dusun, sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan wiraswasta namun banyak juga yang bekerja sebagai buruh dan lain sebagainya. Tidak ada hal yang begitu menarik perhatian dari sudut pandang mata pencaharian masyarakat di Desa Hessa Perlompongan, dikarenakan Desa ini berlokasi dipinggiran jalan lintas Sumatera sehingga memungkinkan letak geografis tersebut memberikan pengaruh bagi masyarakat Desa Hessa Perlompongan untuk memiliki mata pencaharian yang beragam.

Demikian halnya dengan suku yang cukup populer dimasyarakat Desa Hessa Perlompongan juga cukup beragam seperti suku jawa, suku melayu dan suku batak, namun masih ada juga beberapa suku lain yang tidak begitu populer di Desa ini seperti suku banjar, suku nias dan lain sebagainya. Kebiasaan masyarakat di Desa ini juga tergolong umum sebagaimana masyarakat yang ada dikota biasanya, yang membedakannya ialah kondisi sosial masyarakat desa yang lebih akrab jika dibandingkan dengan kondisi sosial masyarakat kota. Dengan Keadaan yang demikian, menjadikan Desa Hessa Perlompongan sekilas sama seperti Desa-Desa biasa pada umumnya karena tidak memiliki ciri khas yang mendominasi dan menarik perhatian masyarakat umum.

Sehubungan dengan hal diatas, sekilas penulis memberi pandangan berdasarkan pengamatan terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 di Desa Hessa Perlompongan. Hingga saat ini di Desa Hessa Perlompongan baru hanya menunjukkan peningkatan pada sektor infrastruktur seperti pengecoran jalan, perbaikan saluran parit dan lain sebagainya, walaupun hal tersebut bisa dinilai sebagai wujud kemajuan bagi Desa, akan tetapi pada aspek kesejahteraan masyarakat Desa belum menunjukkan tanda-tanda terhadap peningkatannya.

Hal tersebut dapat diperhatikan dengan melihat tingkat perekonomian yang merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan masyarakat Desa, sejak empat tahun belakangan ini belum ada terlihat perubahan konkrit yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Hessa Perlompongan, hal ini bisa dinilai dengan mengamati keadaan perekonomian masyarakat Desa yang masih tetap sama seperti empat tahun sebelumnya. Dapat disederhanakan bahwa walaupun saat ini sudah ada dana yang di alokasikan kesetiap desa, Desa Hessa Perlompongan masih belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan pada kesejahteraan masyarakatnya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Dalam Upaya Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan pemikiran dan latar belakang penelitian dikaitkan dengan fokus penelitian, maka penelitian ini merumuskan masalah pokok bahwa Alokasi Dana Desa di tujukan untuk kepentingan bernegara salah satunya iyalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk masyarakat Desa. Secara spesifik, rumusan masalah tersebut diturunkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 di Desa Hessa Perlompongan sudah efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor kendala/penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 di Desa Hessa Perlompongan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

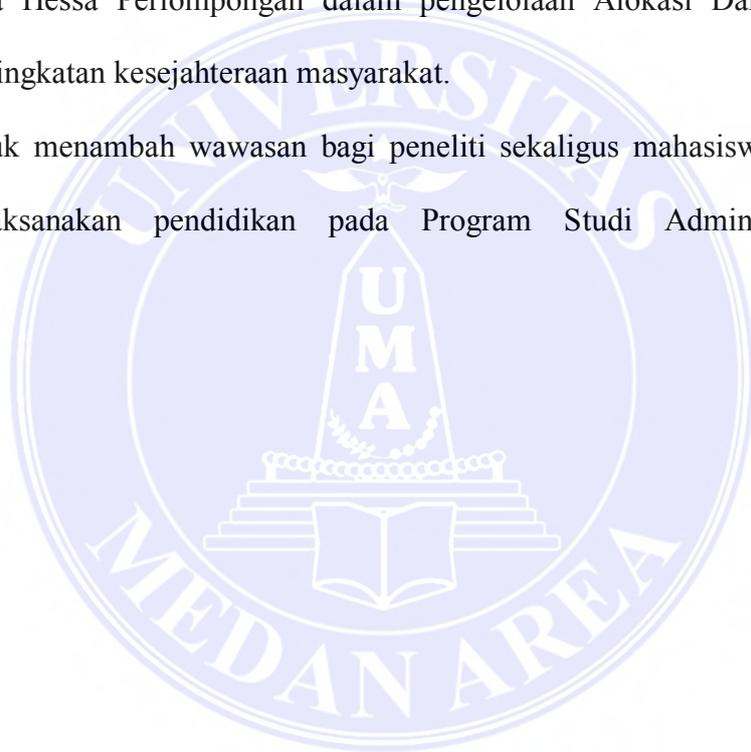
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas dari pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Hessa Perlompongan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala/penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 di Desa Hessa Perlompongan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah:

1. Sebagai salah satu syarat dan kewajiban dalam menyelesaikan studi S1 untuk mencapai gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi Pemerintah Desa Hessa Perlompongan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk menambah wawasan bagi peneliti sekaligus mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan pada Program Studi Administrasi Publik.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif memiliki arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) ataupun dapat membawa hasil. Efektivitas merupakan keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang di capai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siagian, 2001 : 24)

Menurut Sondang P. Siagian (2001 : 4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat dicapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, maka semakin efektif pula suatu kegiatan atau program tersebut, sehingga kata efektivitas bisa juga di artikan sebagai tingkat

ataupun tolok ukur keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dari rencana yang telah ditetapkan.

2.1.1. Ukuran Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas suatu program bukanlah hal yang mudah, karena tingkat efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai dan menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah diciptakan. Jika usaha atau hasil tindakan yang dilakukan tidak mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, maka hal tersebut bisa dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria yang bisa di gunakan untuk pencapaian efektif yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2001 : 77), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan/staf dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang di ikuti dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantab, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya

kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya system pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan menurut Richard M. Steers (2005 : 53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” menyatakan teori mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

2. Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolok ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari beberapa definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu disampaikan bahwa peneliti akan menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (2005 : 53), yaitu: Pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan.

2.2. Teori Birokrasi

Berdasarkan suku kata birokrasi berasal dari kata "*bureau*" yang berarti meja atau kantor dan kata "*kratia*" (*cratein*) yang berarti Pemerintah. Istilah birokrasi juga kerap diterjemahkan sebagai Pemerintah yang anggota-anggotanya disebut aparat birokrasi atau birokrat. Menurut Sedarmayanti (2009 : 67) birokrasi

merupakan system penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk memahami birokrasi dalam Wicaksono (2006 : 7-9), menurut Jan-Erik Lane pada tulisannya yang berjudul “*Introduction: The Concept of Bureaucracy*” dalam *Bureaucracy and Public Choice* (1987 : 1-31) adalah *professional administration* (administrasi profesional). Administrasi profesional merupakan pendekatan sosiologis yang memandang birokrasi sebagai sebuah bagian dari tipe organisasi. Referensi utamanya adalah tipe ideal birokrasi Max Weber yang memuat sejumlah unsur berikut:

1. Pembagian divisi pegawai yang terdefinisi secara jelas
2. Struktur otoritas impersonal
3. Memiliki jenjang hierarki
4. Bergantung pada aturan formal
5. Menggunakan sistem merit pada pegawai
6. Ketersediaan karir
7. Pemisahan jarak antara kehidupan sebagai anggota organisasi dan kehidupan pribadi.

Dalam konteks birokrasi pemerintahan, Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin dalam bukunya *Policy Implementation and Bureaucracy* (1982:32) menyatakan bahwa birokrasi pemerintahan berhubungan dengan urusan-urusan publik. Adapun tujuan penyediaan birokrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan oleh Ripley dan Franklin dalam Wicaksono (2006 : 9) adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan sejumlah layanan sebagai hakikat dari tanggung jawab pemerintah
2. Memajukan kepentingan sector ekonomi spesifik seperti pertanian, buruh atau segmen tertentu dari bisnis privat
3. Membuat regulasi atas berbagai aktivitas privat
4. Mendistribusikan sejumlah keuntungan seperti pendapatan, hak-hak, perawatan medis dan lain-lain.

2.2.1. Tipe dan Prinsip Birokrasi

Menurut Weber dalam Thoah (2007 : 17-18), tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut:

1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.
2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas kebawah dan kesamping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyangang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya.
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (*job description*) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak.

5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pension sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.
7. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif.
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan *resource* (sumber daya) instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
9. Setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

Pada level yang umum, apabila birokrasi memberikan pelayanan publik dengan baik maka birokrasi tersebut mampu menunjukkan sejumlah indikasi perilaku sebagai berikut:

1. Memproses pekerjaannya secara stabil dan giat
2. Memperlakukan individu yang berhubungan dengannya secara adil dan berimbang
3. Mempekerjakan dan mempertahankan pegawai berdasarkan kualifikasi profesional dan orientasi terhadap keberhasilan program
4. Mempromosikan staff berdasarkan system merit dan hasil pekerjaan baik yang dapat dibuktikan

5. Melakukan pemeliharaan terhadap prestasi yang sudah dicapai sehingga dapat segera bangkit bila menghadapi keterpurukan, Wicaksono (2006 : 9).

2.3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang mengatur tentang pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten/Kota dari hasil perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dibagikan secara proporsional.

2.3.1. Tujuan Dan Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Adapun Tujuan dari penggunaan ADD menurut Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat
5. Meningkatkan kemandirian Desa.

Dalam pencapaian tujuan tersebut, perlu adanya dasar yang jelas dalam pengelolaan ADD agar penggunaannya lebih tepat sasaran. Adapun dasar yang bisa dijadikan acuan dalam pengelolaan ADD tersebut ialah prinsip dan asas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2017. Prinsip dan asas pengelolaan ADD tersebut ialah:

1. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dan seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. ADD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
3. ADD digunakan secara hemat, terarah, terkendali dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.4. Teori Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat, Rambe dalam Euis (2006 : 13).

Sumarti dalam Iskandar (2012 : 28) mendefinisikan kesejahteraan merupakan kondisi relatif yang dibentuk masyarakat melalui interaksi sosial. Pendefinisian tersebut didasarkan pada stratifikasi sosial dalam masyarakat. Ketika suatu golongan menempati posisi dominan dalam masyarakat, definisi kesejahteraan lebih berorientasi pada golongan status tersebut, misalnya golongan priayi dan wong cilik. Golongan priayi berorientasi pada keraton dan sebagai pusat tradisi besar Jawa, sedangkan golongan wong cilik berorientasi pada desa sebagai tradisi lokal.

Kesejahteraan sosial juga bisa didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 1).

2.4.1. Bidang-Bidang dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Secara konvensional ada beberapa bidang yang masuk dalam bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit, digambarkan oleh Fink, Friedlander,

Mendoza, Zastrow, dan Kirst-Ashman, yang dinyatakan oleh Isbandi dalam bukunya Kesejahteraan Sosial (2013 : 91-101), antara lain meliputi:

1. Bidang yang Terkait dengan Sistem Penyampaian Layanan (*Service Delivery System*).

Sistem penyampaian layanan menurut Friedlander memainkan peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan pengembangan jaringan system penyampaian layanan yang baik maka salah satu unsur penting dalam proses pemberian bantuan terhadap klien dapat terpenuhi. Bentuk layanan yang ditawarkan dari system layanan kemanusiaan dapat beragam, seperti bantuan terhadap: yatim-piatu, rumah sakit, lanjut usia, penyandang cacat, lembaga yang memberi bantuan terhadap keluarga dari terpidana penjara, rumah penampung untuk para gelandangan, dan lain sebagainya.

2. Bidang yang Terkait dengan Layanan Sosial Terhadap Keluarga.

Hal ini penting diperhatikan mengingat bahwa keluarga merupakan unit dasar terkecil dari suatu masyarakat, keluargalah yang pada awalnya membentuk dan membangkitkan kepribadian seseorang.

3. Bidang yang Terkait dengan Pelayanan Terhadap Anak-Anak dan Generasi Muda.

Fink Melihat layanan terhadap anak mempunyai tanggung jawab, antara lain untuk mendukung kehidupan keluarga, pencegahan dan perlindungan terhadap anak agar mereka tidak ditelantarkan dan dianiaya. Layanan semacam ini dilakukan bertujuan untuk menyediakan cara agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat.

4. Bidang yang Terkait dengan Kelompok Khusus

Mendoza menjelaskan bidang yang terkait dengan kelompok khusus ini sangat beragam, diantaranya adalah:

1. Pengguna dan penyalahgunaan narkoba
2. Kelompok perempuan yang secara sosial kurang diuntungkan (*socially disadvantaged women*)
3. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
4. Penyandang disabilitas

5. Bidang yang Terkait dengan Pengentasan Kemiskinan

Dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan, Friedlander lebih menonjolkan pada peran praktisi dalam mengembangkan kebijakan, program aksi komunitas di masyarakat dan pengembangan masyarakat guna menanggulangi kemiskinan. Sedangkan Kirst-Ashman melihat program dalam rangka pengentasan kemiskinan pada dasarnya terkait dengan program jaminan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin kehidupan warganya ketika mereka sedang menghadapi masalah ataupun kesulitan.

6. Bidang yang Terkait dengan Area Lain

Zastrow (2004) menjabarkan secara singkat bahwa area yang ditangani bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit antara lain meliputi:

1. Mencarikan tempat tinggal bagi anak-anak yang tidak mempunyai orang tua
2. Merehabilitasi orang-orang yang kecanduan alkohol dan narkoba
3. Menjadikan hidup para lansia lebih bermakna

4. Membantu orang miskin agar dapat memenuhi kebutuhan keuangan mereka
5. Merehabilitasi remaja dan orang dewasa yang melakukan pelanggaran hukum
6. Memenuhi kebutuhan kesehatan dan bantuan hukum bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan
7. Menyediakan layanan penitipan anak (*child-care*) untuk orang tua yang bekerja diluar rumah
8. Menyediakan pelatihan vokasional (bimbingan kejuruan) dan kesempatan kerja bagi mereka yang belum terampil dan belum bekerja
9. Menyediakan program yang mendukung dan memperkaya pertumbuhan dan perkembangan seorang anak hingga dewasa..
10. Menyediakan perumahan yang memadai bagi mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal
11. Memberikan layanan terhadap keluarga yang tertimpa musibah.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya di Indonesia berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:

1. Perseorangan
2. Keluarga
3. Kelompok
4. Masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan tersebut diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kriteria masalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan
2. Ketelantaran
3. Kecacatan
4. Keterpencilan
5. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku
6. Korban bencana
7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

1. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

2. Jaminan Sosial

Jaminan sosial dimaksudkan untuk:

1. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
2. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
3. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:

1. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
2. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

2.4.2. Indikator Kesejahteraan

Indikator merupakan alat untuk menyampaikan informasi secara menyeluruh melalui cara yang berbeda-beda (angka, grafik, dll) dari suatu fenomena kompleks yang memiliki arti luas. Secara sederhana indikator adalah suatu yang bisa membantu seseorang untuk bisa memahami posisi dan kedudukan saat ini, arah yang akan dituju, dan berapa jauh dapat melakukan perbaikan, serta berapa lama untuk mencapai arah yang akan dituju. Indikator adalah alat bantu untuk menunjukkan indikasi tertentu yang dilakukan dengan mengukur fenomena dengan suatu alat ukur, Sunarti (2006 : 18).

Oleh karenanya pembahasan mengenai indikator kesejahteraan dapat ditinjau berdasarkan data yang dimuat dalam situs www.gfpanjalu.com yang menyatakan bahwa untuk mengukur tingkat kesejahteraan, telah dikembangkan beberapa indikator operasional yang menggambarkan tingkat

pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangan. Sedangkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat kesejahteraan akan digunakan beberapa indikator yang telah digunakan oleh BKKBN. Indikator ini berdasarkan pendataan keluarga tahun 2000, adapun beberapa indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I

2. Keluarga Sejahtera I

1. Melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing
2. Makan 2 (dua) kali sehari atau lebih
3. Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan
4. Lantai rumah bukan dari tanah
5. Jika anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan.

3. Keluarga Sejahtera II

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing
2. Minimal seminggu sekali keluarga tersebut menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk
3. Memperoleh pakaian baru dalam setahun terakhir
4. Luas lantai tiap penghuni rumah satu 8 m²
5. Anggota keluarga sehat dalam keadaan tiga bulan terakhir, sehingga dapat menjalankan fungsi masing-masing
6. Keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap

7. Bisa baca tulis latin bagi anggota keluarga dewasa yang berumur 10-60 tahun
 8. Seluruh anak yang berumur 7-15 tahun bersekolah pada saat ini
 9. Anak hidup dua atau lebih dan saat ini masih memakai alat kontrasepsi
4. Keluarga Sejahtera III
1. Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama
 2. Keluarga mempunyai tabungan
 3. Keluarga biasanya makan bersama minimal 1 (satu) kali dalam sehari
 4. Turut serta dalam kegiatan masyarakat
 5. Keluarga mengadakan rekreasi bersama minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
 6. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/televisi/majalah
 7. Anggota keluarga dapat menggunakan sarana transportasi
5. Keluarga Sejahtera III Plus
1. Memberikan sumbangan secara teratur dan sukarela untuk kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi
 2. Aktif sebagai pengurus yayasan/instansi.

Dengan indikator-indikator diatas yang telah ditetapkan Pemerintah dalam UU Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, maka dapat diketahui mana yang termasuk keluarga pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, dan sejahtera III serta sejahtera III plus.

2.5. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Misno yang di muat dalam jurnal PERSPEKTIF/ Volume 8/ Nomor 2/ Oktober 2015 dengan judul MANFAAT ALOKASI DANA DESA BAGI MASYARAKAT DESA (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat) menyatakan bahwa manfaat Alokasi Dana Desa secara keseluruhan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai tujuan utamanya, salah satu bentuk kegiatannya ialah melakukan pembangunan infrastruktur desa, misalnya seperti perbaikan jalan dan pembukaan jalan, pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut dituangkan dalam hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Blankahan yaitu Bapak Anwar.

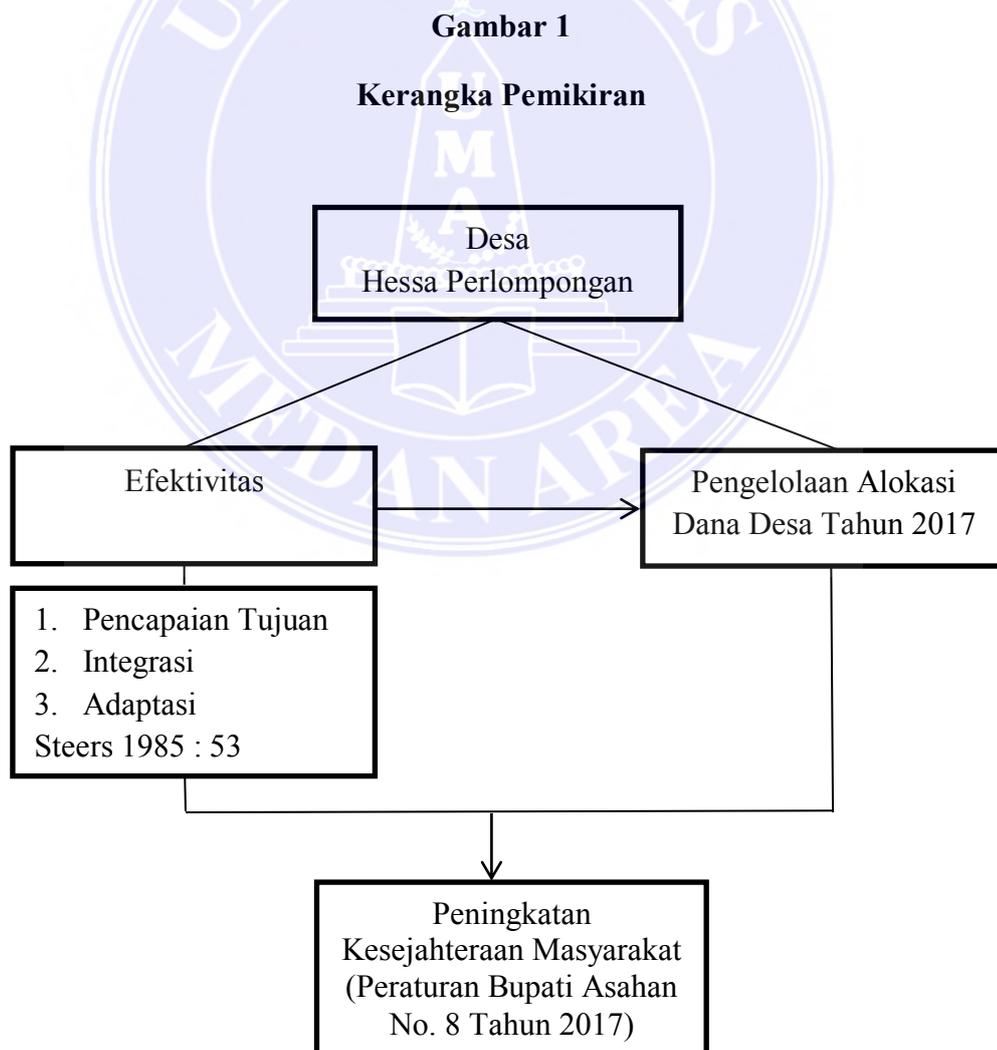
Peneliti menyimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah keberadaannya sangat mempengaruhi laju pertumbuhan setiap desa. Demikian halnya dengan Desa Blankahan dengan adanya ADD saat ini maka Desa Blankahan sangat terbantu dalam melaksanakan pembangunan desa secara bertahap demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pada sisi lainnya terkait keberadaan ADD maka Pemerintah Desa Blankahan perlu meningkatkan pengetahuan SDM Pemerintahan Desa dalam mengelola dan menggunakan keuangan ADD sebagaimana yang diharapkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6. Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2013 : 92) mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek

permasalahan. Kerangka berpikir bisa juga diartikan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel penelitian.

Seiring dengan adanya Alokasi Dana Desa tentunya dapat diukur melalui kerangka pemikiran yang akan digambarkan nantinya, untuk mengetahui efektivitas dari pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Hessa Perlompongan. Adapun kerangka pemikiran yang bisa digambarkan ialah sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum dan menafsirkan makna data, Ahmad (2015 : 52).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, pada Februari 2018 - Maret 2018

3.3. Informan Penelitian

3.3.1. Informan Kunci

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui secara pokok data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Hessa Perlompongan Bapak Franki Suwito Lubis.

3.3.2. Informan Utama

Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam hal yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pemerintahan Desa Hessa Perlompongan Bapak Agus Setiawan.

3.3.3. Informan Tambahan

Informan Tambahan yaitu mereka yang mengetahui informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam hal yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini yaitu Perangkat Desa dan masyarakat Desa Hessa Perlompongan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan terlebih dahulu secara langsung terhadap sesuatu yang akan diteliti, melalui teknik ini dapat diketahui data sebagai bukti untuk menjawab pokok permasalahan.

3.4.2. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, Sugiyono (2013 : 231).

3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi bisa diartikan mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, transkrip, notulen, majalah, rapat, agenda, gambar dan lain sebagainya.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah seperti Miles and Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: Reduksi, Penyajian dan Penarikan Kesimpulan, Jamaluddin Ahmad (2015 : 212)

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data biasanya dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya dan mencari bila perlu.

3. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.6. Uji Keabsahan Data (Valid/ Realibel)

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, terutama memeriksa informasi yang didapatkan dilapangan, berdasarkan berbagai dokumen hasil kegiatan perencanaan dan data-data lapangan. Uji kepercayaan dilakukan dengan memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif dan menggunakan bahan referensi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Iskandar, A. 2012. *Benchmarking Kemiskinan*. Bogor: IPB Press.
- Salam, Dharma Setyawan. 2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Steers, Richard M. 2005. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2007. *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wicaksono, Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017

Peraturan Desa Hessa Perlompongan Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Aahan

Jurnal:

Misno. 2015. *Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat)*. Medan: Jurnal Perspektif. Vol. 8, No. 2.

Naskah Akademik:

Sunarti, Euis. 2006. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, Dan Keberlanjutannya*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.

Media:

www.kemejingnet.com (diakses pada 21 November 2017).

desa-membangun.blogspot.co.id (diakses pada 22 November 2017).

www.gfpanjalu.com (diakses pada 23 Januari 2018).

LAMPIRAN 1

DAFTAR REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2017

Kecamatan : Air Batu
Desa : Hessa Perlompongan

Triwulan I

NO	BIDANG / KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
	1. Kegiatan Pembayaran Tetap dan Tunjangan		
	A. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	1 Kepala Desa (1 Org x 3 Bln 1.850.000)	Rp 5,550,000	✓
	2 Bendahara Desa (1 Org x 3 Bln x 925.000)	Rp 2,775,000	✓
	3 Kaur Desa (4 Org x 3 Bln x 925.000)	Rp 11,100,000	✓
	4 Kepala Dusun (4 Org x 3 Bln x 925.000)	Rp 11,100,000	✓
	B. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	1 Kepala Desa	Rp 2,400,000	✓
	C. Tunjangan BPD dan Anggotanya		
	1 Tunjangan BPD dan Anggotanya (11 Org x 3 Bln x 250.000)	Rp 8,250,000	✓
	2. Kegiatan Operasional Perkantoran		
	A. Belanja Barang dan Jasa		
	1 ATK	Rp 535,775	✓
	2 Benda Pos dan Materai	Rp 300,000	✓
	3 Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	Rp 700,000	✓
	4 Belanja Makan dan Minum Rapat	Rp 1,000,000	✓
	5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 1,500,000	✓
	6 Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp 1,500,000	✓
	B. Belanja Modal		
	Pengadaan Peralatan Kantor		
	1 Printer Foto Copy HVS	Rp 5,000,000	✓
	2 Printer Foto Copy A4	Rp 3,100,000	✓

	Belanja Modal Pengadaan Komputer		
	1 Laptop Cor I 3	Rp 6,900,000	✓
	3. Kegiatan Operasional BPD		
	1 Belanja Operasional BPD	Rp 1,000,000	✓
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
		-	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
	1. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		
	Pemberian Bantuan Kepada :		
	1 Bilal Mayit (20 Org x 3 BLn x 175.000)	Rp 10,500,000	✓
	2 Penggali Kubur (14 Org x 3 BLn x 175.000)	Rp 7,350,000	✓
	3 Guru Mengaji (28 Org x 3 BLn x 175.000)	Rp 14,700,000	✓
	Belanja Barang Diberikan Kepada Masyarakat		
	1 Belanja Kegiatan MTQ Desa	Rp 6,000,000	✓
	2 Belanja Kegiatan Festival Nasyid Desa	Rp 6,000,000	✓
	2. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK		
	1 Honorium Kader Posyandu (20 Org x 3 BLn x 40.000)	Rp 2,400,000	✓
	2 Honor LPM (15 Org x 3 BLn x 175.000)	Rp 7,875,000	✓
	3. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban		
	1 Honor PU Desa (1 Orang x 3 Bln x 250.000)	Rp 750,000	✓
	4. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga		
	1 Bantuan Kepada Lembaga Kemasyarakatan	Rp 2,000,000	✓
	5. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya		
	Bantuan Kepada Seni Budaya Nuansa Keagamaan	Rp 2,500,000	✓
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	1. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 9,000,000	✓
	J U M L A H	Rp 131,785,775	✓

Triwulan II

NO	BIDANG / KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
	1. Kegiatan Pembayaran Tetap dan Tunjangan		
	A. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	1 Kepala Desa (1 Org x 3 Bln 1.850.000)	Rp 5,550,000	✓
	2 Kasi (3 Org x 3 Bln x 925.000)	Rp 8,325,000	✓
	3 Kaur Desa (3 Org x 3 Bln x 925.000)	Rp 8,325,000	✓
	4 Kepala Dusun (4 Org x 3 Bln x 925.000)	Rp 11,100,000	✓
	B. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	1 Kepala Desa (April - Juni)	Rp 3,450,000	✓
	2 Sekretaris Desa (Maret - Juni)	Rp 1,000,000	✓
	3 Bendahara Desa (Maret - Juni)	Rp 1,000,000	✓
	4 Selisih Tunjangan Ka. Desa Bulan Maret	Rp 350,000	✓
	C. Tunjangan BPD dan Anggotanya		
	1 Tunjangan BPD dan Anggotanya (11 Org x 3 Bln x 250.000)	Rp 8,250,000	✓
	2. Kegiatan Operasional Perkantoran		
	A. Belanja Barang dan Jasa		
	1 ATK Kantor	Rp 160,775	✓
	5 Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 2,000,000	✓
	B. Belanja Modal		
	Belanja Modal Alat-alat Angkutan		
	1 Kendaraan Dinas Roda 2n 150 cc	Rp 36,000,000	✓
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
		-	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
	1 Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban		
	1 Honor PU Desa (1 Orang x 3 Bln x 250.000)	Rp 900,000	✓
	2 Selisih Honor Petugas PU Desa (Bulan Maret)	Rp 50,000	✓

	2 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		
	Pemberian Bantuan Kepada :		
	1 Bilal Mayit (20 Org x 3 BLn x 175.000)	Rp 10,500,000	✓
	2 Penggali Kubur (14 Org x 3 BLn x 175.000)	Rp 7,350,000	✓
	3 Guru Mengaji (28 Org x 3 BLn x 175.000)	Rp 14,700,000	✓
	3 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK		
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja		
	1 Honorium Kader Posyandu (20 Org x 3 BLn x 40.000)	Rp 2,400,000	✓
	2 Honor LPM (15 Org x 3 BLn x 175.000)	Rp 7,875,000	✓
	4 Belanja Bantuan diberikan Kepada Masyarakat		
	1 Belanja Operasional LPM	Rp 1,500,000	✓
	2 PMT Posyandu	Rp 1,000,000	✓
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
		-	
	J U M L A H	Rp131,785,775	✓

Triwulan III

NO	BIDANG / KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
	1. Kegiatan Pembayaran Tetap dan Tunjangan		
	A. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	1 Kepala Desa (1 Org x 3 BLn 1.850.000)	Rp 5,550,000	✓
	2 Kasi (3 Org x 3 BLn x 925.000)	Rp 8,325,000	✓
	3 Kaur Desa (3 Org x 3 BLn x 925.000)	Rp 8,325,000	✓
	4 Kepala Dusun (4 Org x 3 BLn x 925.000)	Rp 11,100,000	✓
	B. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	1 Kepala Desa (Juli- September)	Rp 3,450,000	✓
	2 Sekretaris Desa (Juli- September)	Rp 750,000	✓
	3 Bendahara Desa (Juli- September)	Rp 750,000	✓

	C. Tunjangan BPD dan Anggotanya		
	1 Tunjangan BPD dan Anggotanya (11 Org x 3 Bln x 250.000)	Rp 8,250,000	✓
	2. Kegiatan Operasional Perkantoran		
	A. Belanja Barang dan Jasa		
	1 ATK Kantor	Rp 74,480	✓
	B. Belanja Modal		
	Pengadaan Peralatan Kantor		
	1 Kipas Angin	Rp 1,500,000	✓
	2 Lemari Es	Rp 3,500,000	✓
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
	1 Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja		
	1 Pembangunan Kamar mandi dan Pengrehapan Ruang Kepala Desa	Rp 17,886,295	✓
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
	1 Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban		
	1 Honor PU Desa (1 Orang x 3 Bln x 250.000)	Rp 900,000	✓
	2 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		
	Pemberian Bantuan Kepada :		
	1 Bilal Mayit (20 Org x 3 BLn x 175.000)	Rp 10,500,000	✓
	2 Penggali Kubur (14 Org x 3 BLn x 175.000)	Rp 7,350,000	✓
	3 Guru Mengaji (28 Org x 3 BLn x 175.000)	Rp 14,700,000	✓
	3 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK		
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja		
	1 Honorium Kader Posyandu (20 Org x 3 BLn x 40.000)	Rp 2,400,000	✓
	2 Honor LPM (15 Org x 3 BLn x 175.000)	Rp 7,875,000	✓
	4 Belanja Bantuan diberikan Kepada Masyarakat		
	1 Biaya Study Cooperasi PKK	Rp 15,000,000	✓

	2 PMT Posyandu	Rp 600,000	✓
	3 Operasional PKK	Rp 1,500,000	✓
	4 Bantuan Kegiatan Pendidikan Dasar, Umum dan Keagamaan	Rp 1,500,000	✓
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
		-	
	J U M L A H	Rp131,785,775	✓

Triwulan IV

NO	BIDANG / KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
	1. Kegiatan Pembayaran Tetap dan Tunjangan		
	A. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	1 Kepala Desa (1 Org x 3 BLn 1.850.000)	Rp 5,550,000	✓
	2 Sekretaris Desa Non PNS (1 Org x12 bln x 1.295.000)	Rp 15,540,000	✓
	3 Kasi (3 Org x 3 BLn x 925.000)	Rp 8,325,000	✓
	4 Kaur Desa (3 Org x 3 BLn x 925.000)	Rp 8,325,000	✓
	5 Kepala Dusun (4 Org x 3 BLn x 925.000)	Rp 11,100,000	✓
	B. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	1 Kepala Desa (Juli- September)	Rp 3,450,000	✓
	2 Sekretaris Desa (Juli- September)	Rp 750,000	✓
	3 Bendahara Desa (Juli- September)	Rp 750,000	✓
	4 Tunjangan BPJS Kesehatan	Rp 6,560,136	✓
	C. Tunjangan BPD dan Anggotanya		
	1 Tunjangan BPD dan Anggotanya (11 Org x 3 Bln x 250.000)	Rp 8,250,000	✓

	2. Kegiatan Operasional Perkantoran		
	A. Belanja Barang dan Jasa		
	1 ATK Kantor	Rp 730,639	✓
	2 Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp 3,630,000	✓
	3 Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 3,000,000	✓
	4 Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 500,000	✓
	B. Belanja Modal		
		-	
	C. Operasional BPD		
	1 Operasional BPD	Rp 1,000,000	✓
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
		-	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
	1 Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban		
	1 Honor PU Desa (1 Orang x 3 Bln x 250.000)	Rp 900,000	✓
	2 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		
	Pemberian Bantuan Kepada :		
	1 Bilal Mayit (20 Org x 3 Bln x 175.000)	Rp 10,500,000	✓
	2 Penggali Kubur (14 Org x 3 Bln x 175.000)	Rp 7,350,000	✓
	3 Guru Mengaji (28 Org x 3 Bln x 175.000)	Rp 14,700,000	✓
	3 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK		
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja		
	1 Honorium Kader Posyandu (20 Org x 3 Bln x 40.000)	Rp 2,400,000	✓
	2 Honor LPM (15 Org x 3 Bln x 175.000)	Rp 7,875,000	✓

	4 Belanja Bantuan diberikan Kepada Masyarakat		
	1 Pengadaan Perlengkapan Posyandu	Rp 2,000,000	✓
	2 PMT Posyandu	Rp 600,000	✓
	3 Operasional TIM IMTAQ	Rp 3,000,000	✓
	4 Bantuan Perbaikan Rumah Ibadah	Rp 5,000,000	✓
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
		-	
	J U M L A H	Rp131,785,775	✓

Diketahui Oleh:
CAMAT AIR BATU

ABD. RAUF FADILAH
NIP. 19651101 198503 1 003

Hessa Perlompongan, 22-01-2018
Kepala Desa Hessa
Perlompongan

FRANKI SUWITO LUBIS

LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto Bersama setelah melakukan wawancara dengan Bapak Franki Suwito Lubis selaku Kepala Desa Hessa Perlompongan (Rabu, 7 Maret 2018).



Foto Bersama setelah melakukan wawancara dengan Bapak Agus Setiawan selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Hessa Perlompongan (Senin, 5 Maret 2018).



Foto Bersama setelah melakukan wawancara dengan Bapak Janun selaku Kepala Dusun III (Jum'at, 9 Maret 2018).



Foto Bersama setelah melakukan wawancara dengan Ibu Miswati selaku Guru Mengaji dari Dusun I (Jum'at, 9 Maret 2018).



Foto Kantor Kepala Desa Hessa Perlompongan yang berlokasi di Dusun IV (Selasa, 13 Maret 2018).